

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kota Inklusif di Kota Yogyakarta. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab ini membahas mengenai peran pemerintah untuk mewujudkan Kota Inklusif, berdasarkan indikator yang ditetapkan, dan siapa saja aktor/*stakeholder* yang ikut berperan mewujudkan Kota Inklusif ini berjalan secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan juga pemerintah.

#### **1.1 Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Inklusif**

Pembahasan mengenai Kota Inklusif ini melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dan membahas kondisi Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dilihat dari beberapa sektor.

##### **1.1.1 Peran Pemerintah**

Pemerintah memegang peran penting dalam terselenggaranya pemerintahan. Koordinasi menyangkut kepentingan umum dan terdapat kewenangan yang diberikan untuk melakukan tindakan bagi kepentingan umum itu sendiri (Labolo, 2015).

###### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan akan berdampak pada banyak orang terutama kelompok-kelompok yang disasar. Kebijakan merupakan perencanaan, pengambilan dan

perumusan keputusan, dan evaluasi yang nantinya akan berpengaruh kepada masyarakat yang dituju (Marzali, 2015). Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan (Anggara, 2014).

Keperluan hadirnya sebuah Kota Inklusif semakin mendesak. Banyak pihak yang mendesak pemerintah Yogyakarta dalam hal ini Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Kota Inklusif baik *stakeholder* dan masyarakat. Pada tahun 2015, dengan kerjasama berbagai pihak telah dilakukan upaya-upaya untuk merancang terwujudnya “Yogyakarta sebagai Kota Inklusif”. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua *stakeholder* sepaham sependapat tentang apa yang dinamakan “kota inklusif” menurut versi Yogyakarta (Bappeda, 2016).

Lima kelompok yang disasar pada Kota Inklusif atau disebut Afirmatif Gender di Kota Yogyakarta, yaitu: Anak, Perempuan, Lansia, Disabilitas, dan Keluarga miskin. Pelaksanaan Kota Inklusif saat ini telah dilaksanakan di delapan kecamatan percontohan Kota Inklusif sejak tahun 2016, yaitu: Kecamatan Gondokusuman, Tegalsrejo, Wirobrajan, Kotagede, Jetis, Kraton, Gedongtengen dan Mantriweron. Setiap tahunnya akan bertambah 2 kecamatan dan pada 2021 seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta akan menjadi Kecamatan percontohan Kota Inklusif.

Pemerintah membuat kebijakan mengenai kota inklusif yang akan membuat semua masyarakat memiliki kesetaraan tanpa ada yang membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas publik dan perlakuan yang sama pada 5 afirmatif gender yang telah menjadi fokus Kota Inklusif. Aparatur Sipil Negara dan semua masyarakat Kota Yogyakarta harus berpartisipasi dalam kebijakan Kota Inklusif ini. Kebijakan membuat semua orang yang ada di Kota Yogyakarta turut serta dalam menyukseskan program yang dilaksanakan. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang supaya perilaku yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang disasar sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Marzali, 2015).

#### b. Pemberdayaan

Setiap kota di Indonesia memiliki pengertian Kota Inklusif masing-masing, walaupun tujuannya adalah sama, memberikan kesetaraan pada semua masyarakat. Pemberdayaan merupakan upaya yang dikembangkan untuk membuat hal baru dan mengajak serta masyarakat dalam aktivitas pembangunan dalam skala lokal meskipun kajian pembahasannya dalam skala yang lebih luas (Abidin, 2013).

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses (Rifa'i 2013). Tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk membuat masyarakat mengerti, memahami, dan menerapkan kebijakan kota inklusif agar program yang telah dibuat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Program yang membuat Afirmati Gender terlibat dalam perumusan kebijakan, mulai dari tingkat

kelurahan hingga kota. Program kota inklusif nantinya akan terus dilaksanakan tidak hanya disaat jangka waktu program tetapi juga terus berkesinambungan. Pemberdayaan tidak akan terlaksana jika para pelaku tidak bekerjasama, pelaku pemberdayaan terdiri dari pemerintahan maupun non pemerintah seperti masyarakat maupun stakeholder (Rifa'I, 2013).

Pemerintahan tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan Kota Inklusif ini. Pemerintah membutuhkan kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Kebijakan Kota Inklusif, diharapkan masyarakat mengetahui dan ikut serta dalam mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah kemudian dilaksanakan/dikerjakan oleh OPD yang ada, kemudian ke pihak lainnya yang ikut serta dalam Kota Inklusif. Semua dinas ikut serta dalam Kota Inklusif ini, tetapi ada dua dinas yang perannya cukup besar yaitu Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA). DPMPPA lebih mengarah pada perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan Dinsos mengarah pada disabilitas, lansia, dan keluarga miskin.

Pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan Kota Inklusif melalui OPD kemudian pihak kecamatan, TKSK, FKI, PKADD, kelurahan, RW, hingga RT melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat secara luas agar masyarakat mengetahui mengenai Kota Inklusif dan ikut terlibat dalam mewujudkan Kota Inklusif. Kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mendukung Kota Inklusif terbentuk, dibantu dengan beberapa stakeholder. Kelompok yang berada di kelurahan seperti Kelompok Baciro, Kadipaten Lestari dan Cokro Selaras Ati merupakan kelompok yang ada kemudian

mendapatkan pelatihan dalam keorganisasian dan mengenai APBD dari *Stakeholder* Perkumpulan Idea, CIQAL, dan *Humanity & Inclusion* (HI).

c. Pelayanan

Pada kebijakan yang di buat oleh pemerintah, masyarakat akan melihat bagaimana pelayanan yang diberikan pada kepada masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk kemudahan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung terwujudnya Kota Inklusif, pemerintah mencoba memberikan dan menyediakan pelayanan terbaik yang mereka bisa. Pelayanan bertindak sebagai katalisator yang memproses sesuai dengan seharusnya. Aparatur atau pegawai dalam organisasi melakukan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada (Batinggi dan Ahmad, 2013).

Saat ini pada tingkat Kecamatan Percontohan Kota Inklusif telah menyediakan akses jalan yang bisa digunakan disabilitas maupun lansia seperti ram dan pegangan besi, ruang pertemuan untuk yang bisa di akses afirmatif gender, ruang laktasi, tempat bermain anak dan kamar mandi yang memudahkan pengguna. Pelayanan publik memiliki arti luas yaitu mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan barang publik, kebutuhan dan hak dasar, kewajiban pemerintah dan Negara, dan komitmen nasional (Dwiyanto, 2018).

Tabel 5.1  
Fasilitas di Kecamatan

Kecamatan Percontohan Kota Inklusif	Akses Jalan ramah Afirmatif Gender	Ruang Pertemuan yang dapat diakses Afirmatif Gender	Toilet untuk Afirmatif Gender	Ruang Laktasi	Tempat Bermain Anak
Gondokusuman	√	√	√		
Tegalrejo	√	√			√
Wirobrajan	√	√			√
Kotagede	√	√	√	√	√
Jetis	√	√	√	√	√
Kraton	√	√	√		√
Gedongtengen	√	√			
Mantrijeron	√	√			

(Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dan observasi)

Sebelum adanya Kebijakan Kota Inklusif banyak ruangan pertemuan yang diletakan di lantai dua, kemudian setelah kebijakan ini ruang pertemuan di pindah ke lantai dasar untuk memudahkan masyarakat bila ada pertemuan. Tidak semua masyarakat bisa dengan mudah mengakses ruang pertemuan yang terletak di lantai atas, atas dasar itu lah banyak yang memindahkan ruang pertemuan ke lantai dasar. Ruang pertemuan boleh tetap berada di lantai atas jika akses jalan bisa dengan mudah dilalui oleh masyarakat semua kalangan.

Begitu juga dengan toilet, mengalami perbaikan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua gedung pasti memiliki toilet yang bisa dipergunakan untuk umum, tetapi tidak semua orang bisa mempergunakan toilet yang telah disediakan. Toilet yang banyak tersedia tidak bisa dipergunakan oleh pengguna kursi roda karena ruangan yang terlalu kecil, tidak memungkinkan kursi roda untuk

masuk dan arah pintu yang mengarah dalam juga menyusahkan pengguna kursi roda untuk mengakses toilet. Pegangan besi juga diperlukan di kamar mandi untuk memudahkan pergerakan antara kursi roda dan toilet. Pegangan besi juga membantu ibu hamil dan lansia. Hal-hal seperti ini diperlukan untuk membuat masyarakat bisa mengakses toilet sendiri dan membuat mereka merasa setara dengan yang lain.

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dari penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak warga negara (Mirnasari, 2013). Pelayanan bagi afirmatif gender tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum. Pelayanan untuk afirmatif gender harus didahulukan daripada masyarakat umum, karena situasi dan kondisi yang ada pada mereka dan masyarakat umum harus mencoba mengerti dan memaklumi. Kecamatan Kotagede memiliki alat yang bisa membantu tunanetra mengetahui prosedur pelayanan yang ada di kecamatan tapi sayangnya alat ini tidak bisa digunakan bersamaan dengan dengan E-KTP.

“Kota Inklusif juga memanfaatkan teknologi pada pelayanan ada alat bantu untuk masyarakat berkebutuhan khusus, untuk disabilitas tapi alat ini hanya untuk tunanetra. Alat seperti tipe yang bisa didengarkan berulang-ulang untuk mendengarkan prosedur pelayanan yang ada di kecamatan tetapi saat ini tidak difungsikan karena server hanya satu, sehingga jika alat ini dinyalakan maka E-KTP tidak bisa dipergunakan begitu sebaliknya.”

(Hasil wawancara dengan salah satu staf di Kecamatan Kotagede pada hari Jum'at, 18 Januari 2019 bertempat di Kecamatan Kotagede)

Beberapa tahun belakangan penggiat dan kelompok masyarakat termasuk tiga kelompok yang ada dikelurahan, seperti Kelompok Baciro, Kadipaten Lestari, dan Cokro Selaras Ati mengusulkan Pembangunan Rumah Layanan Disabilitas,

karena anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang terbatas maka Rumah Layanan Disabilitas akan ada satu untuk Kota Yogyakarta dan menggunakan tempat yang sudah ada dan akan direalisasikan tahun depan.

Rumah Layanan Disabilitas sangat dibutuhkan oleh disabilitas, nantinya Rumah Layanan Disabilitas ini akan menjadi tempat yang memfokuskan kegiatan pelayanan baik dokumen maupun kesehatan. Disabilitas bisa mendapatkan terapi di Rumah Layanan Disabilitas tersebut.

### **5.1.2 Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sesuatu yang penting karena masyarakatlah yang paling mengetahui apa yang paling mereka butuhkan (Dewi, 2013; Putra, 2013). Selain kebijakan yang dibuat pemerintah untuk di patuhi oleh masyarakat atau *top-down*, pemerintah juga harus menerima *bottom-up*. Pemerintah juga harus menerima saran dan masukan dari masyarakat, tidak semua kebijakan dan program yang di buat oleh pemerintah sesuai dan mampu dilakukan oleh masyarakat. Saran dan masukan dari masyarakat akan mendukung dan membuat kebijakan dan program dari pemerintah bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pihak pemerintah maupun masyarakat, karena tidak semua kebijakan bisa terwujud hanya dengan pemikiran satu sisi saja. Pemenuhan kebutuhan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat karena proses *top down* tanpa mengikut sertakan masyarakat (Sagaris, 2014).

Kota Inklusif yang di buat Pemerintah Kota Yogyakarta menciptakan Forum Kota Inklusif (FKI) di setiap kecamatan yang menjadi Kecamatan



percontohan Kota Inklusif. FKI terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan juga pemerintahan. FKI terbentuk dengan tujuan mengajak minoritas untuk ikut menyuarakan pendapatnya, sehingga tidak selalu merasa terabaikan. Partisipasi dari semua orang sangat dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan maupun keinginan dari masyarakat dan masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang di buat. Pada setiap pertemuan yang diadakan oleh FKI, kecamatan akan menyediakan tempat dan kebutuhan yang diperlukan. Ada saatnya pemerintah yang secara langsung memberikan pengarahan kepada masyarakat dan ada pula saatnya pemerintah menyerahkan pengelolaanya kepada kelompok masyarakat pada konteks tertentu (Fadil, 2013).

Musrembang setiap tahunnya pasti terlaksana. Mulai dari kelurahan hingga tingkat nasional. Musrembang kelurahan dibawa ke musrembang kecamatan dan berlanjut pada musrembang nasional. Selain Musrembang yang setiap tahunnya dilaksanakan, di Kota Yogyakarta ada juga Musrembang Anak yang setiap tahunnya juga dilaksanakan. Setiap tahunnya DPMPPA Bidang Perlindungan Anak mengundang anak-anak di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan Kota Layak Anak maka ada Forum Anak di setiap kelurahan dan kecamatan. Wakil anak dari setiap kelurahan dan kecamatan dikumpulkan di Balai kota untuk melaksanakan Musrembang Anak. Musrembang Anak diadakan untuk memenuhi hak anak. Hak anak ada 4, yaitu:

1. Hak Hidup
2. Tumbuh Kembang
3. Perlindungan

#### 4. Partisipasi

Musrembang Anak diarahkan untuk mengajak anak ikut berpartisipasi, untuk berpikir. Sejauh ini anak-anak mempunyai pemikiran tetapi belum ada yang menampung. Melalui Musrembang Anak mengajak anak SMP dan SMA untuk menyalurkan ide-ide mereka agar anak-anak memiliki wadah dan masih dalam pengawasan sehingga tidak mengarah kepada hal-hal negatif. Partisipasi yang dilaksanakan akan meningkatkan kemandirian yang nantinya membuat masyarakat mengalami percepatan pembangunan (Laksana, 2013).

“Kami mencoba membuat mereka lelah dengan mengajak mereka mencari tahu kebutuhan mereka. Misalnya, polisi tidur yang terlalu tinggi bahaya untuk anak. Penerangan jalan yang kurang. Hal-hal seperti itu dibutuhkan anak tapi tidak direspon oleh orang tua. Banyak keinginan dan kebutuhan anak yang tidak diakomodasi orang tua”

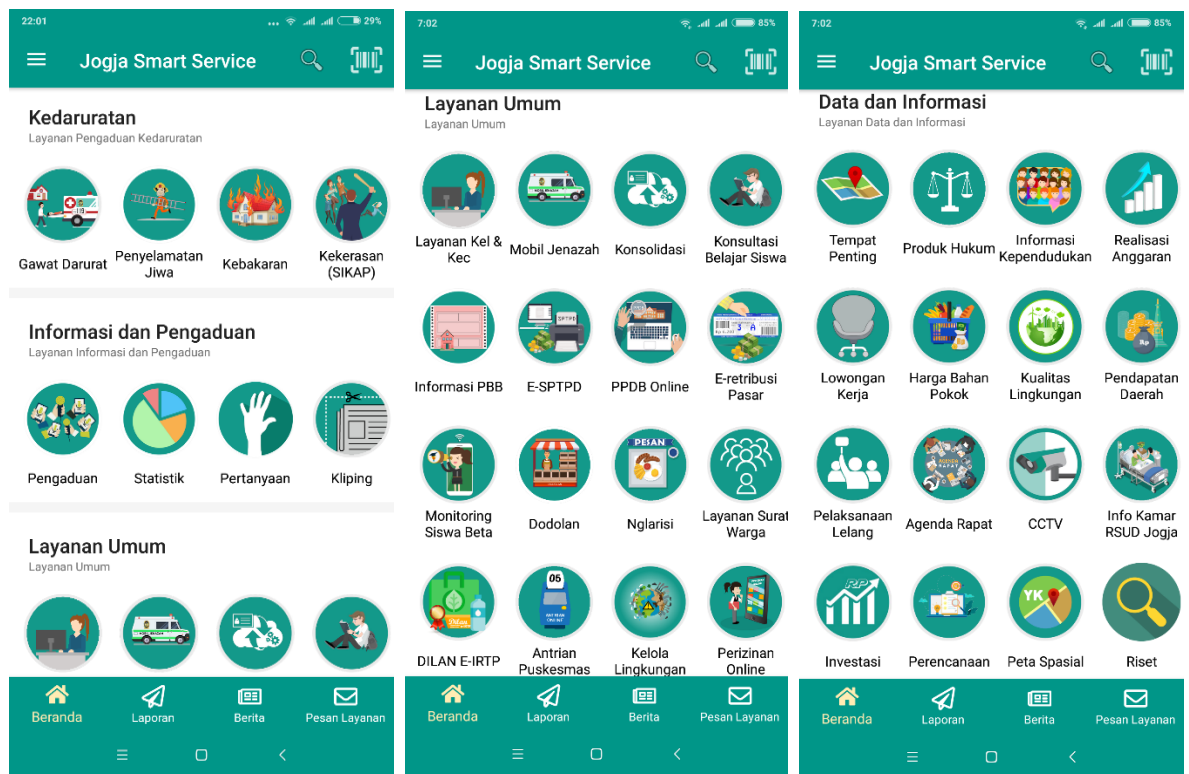
(Kutipan wawancara dengan narasumber Pak Hendro (Kepala Bidang Perlindungan Anak DPMPPA) pada hari Kamis, 6 Februari 2019 di DPMPPA)

Anak-anak yang diundang pada Musrembang Anak adalah perwakilan anak dari kelurahan dan kecamatan, anak jalanan dan juga difabel. Selain Musrembang Anak ada kegiatan Kongres Anak dan *Youth Super Camp*. Kegiatan-kegiatan seperti ini membuat pemerintah mengetahui kebutuhan dari masyarakat, menyediakannya agar semua kebutuhan bisa terpenuhi.

#### **1.1.3 Mobilitas**

Mobilitas adalah suatu gerak perpindahan dari suatu tingkat satu tingkat yang lain (Setiadi dan Kolip, 2013). Mobilitas mencoba memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan untuk melakukan banyak hal dan memberikan

manfaat yang besar. Mobilitas tidak semua mengarah ke arah yang baik tergantung masyarakat yang menjalaninya (Rokhmah, 2013). Pandangan pemerintah mobilitas bisa membuat perubahan besar yang memberikan kemudahan dan membantu masyarakat. Upaya untuk mempermudah dalam pelayanan, pemerintah berusaha meningkatkan dan memperbaiki sedemikian rupa agar sesuai dengan harapan dan keinginan banyak orang. *Jogja Smart Service* (JSS) adalah salah satu aplikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memudahkan masyarakat.



Gambar 5.1  
Aplikasi *Jogja Smart Service*  
(Sumber: Aplikasi *Jogja Smart Service*)

Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang sedang terjadi, komplain dan juga melakukan pengajuan dokumen hanya melalui JSS. JSS bisa sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah bagi mereka yang bisa mempergunakannya, tetapi tidak semua masyarakat bisa mempergunakannya, tidak semua orang memiliki

perangkat yang mendukung, dan tidak semua orang merasa itu mempermudah malah membuat semakin sulit.

Selain JSS, pemerintah sedang mencoba alternatif lain akan semakin mempermudah warga. Prosedur yang harus dilewati untuk pengurusan dokumen adalah RT, RW baru Kelurahan, melalui pengembangan ini warga hanya dengan menginformasikan kepada Ketua RT tanpa perlu mendatangi, kemudian Ketua RT menginformasikan hal yang sama kepada RW secara berjenjang hingga ke kelurahan, ketika ada pemberitahuan kepada warga yang bersangkutan barulah warga mendatangi kelurahan untuk prosedur selanjutnya.

Telah banyak perubahan yang dibuat untuk menciptakan Kota Yogyakarta menjadi Kota Inklusif, seperti peningkatan fasilitas infrastruktur, sarana dan prasarana. Gedung-gedung mulai di renovasi untuk menyesuaikan, akses jalan, maupun transportasi walaupun belum semuanya bisa sesuai dengan harapan pengguna. Masih banyak yang perlu dibenahi untuk mewujudkan semua sebagaimana yang diharapkan. Kritik dan saran pasti selalu ada di dalam pekerjaan yang dilakukan pemerintah.

Banyak pendapat yang di ungkapkan mengenai keadaan tersebut terutama pada:

1. Akses jalan

Kebijakan Kota Inklusif membuat akses jalan dibenahi untuk mendukung Kota Yogyakarta Inklusif. *Guiding Block* sudah banyak di tambahkan di jalan untuk membantu perjalanan disabilitas. Pemasangan *guiding block* masih terjadi

kekeliruan karena masih mengarah ke tiang ataupun selokan. Pemasangan pembatas jalan di Malioboro pada akhirnya juga mengganggu pengguna kursi roda. Pemasangan pembatas jalan tidak memperhitungkan tangan dari pengguna kursi roda, saat pengguna kursi roda menggerakkan kursi rodanya sendiri maka jarak yang di berikan itu tidak cukup. Pemasangan pembatas jalan hanya memperhitungkan jarak kursi roda, tidak memperhitungkan tangan dari pengguna. Ram atau jalur untuk kursi roda pada gedung pemerintahan dan halte juga sering di permasalahan karena terlalu curam untuk di lalui. Seharusnya ram di buat melingkar atau landai agar pengguna bisa menggunakannya tanpa bantuan orang lain, dan bahkan di beberapa halte ram terhalang oleh pohon ataupun pot.

## 2. Transportasi

Berkeliling Kota Yogyakarta sekarang sudah sangat mudah. Transjogja merupakan alat transportasi yang bisa digunakan untuk menjelajahi Kota Yogyakarta. Bisa dipergunakan oleh semua warga, baik warga Yogya maupun pendatang. Transjogja diharapkan bisa di akses oleh semua, tetapi walaupun demikian masih ada kekurangan yang sering dikeluhkan. Para pengguna mengeluhkan transjogja yang tidak berhenti secara benar, dan terburu-buru ketika meninggalkan halte. Tidak semua orang bisa cepat untuk naik dan turun dari Transjogja, terutama kaum rentan. Renggang antara Transjogja dan halte pun menimbulkan masalah untuk kaum rentan. Transjogja juga telah menyediakan tempat untuk kursi roda di dalamnya, disabilitas dengan kursi roda berpendapat alangkah lebih baik ada pegait

yang dipasangkan pada kursi roda mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

#### **1.1.4 Ekonomi**

Perekonomian merupakan salah satu faktor penting penunjang kehidupan. Perekonomian dengan tujuan ekonomis memiliki arti peningkatan pendapatan daerah, mengembangkan industri lokal dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat (Kadarisman, dkk, 2016). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Melalui pelatihan yang diberikan masyarakat mampu membuka lapangan usaha bagi dirinya sendiri ada. Pelatihan diberikan kepada seluruh warga yang memiliki KTP Kota Yogyakarta, dan khusus pelatihan untuk Difabel: peserta disabilitas tunarungu (tuli) dan tuna daksa (fisik ringan).

Pelatihan yang diberikan membantu warga untuk memiliki *skill* yang berguna membuka usaha sendiri maupun yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagi mereka yang memiliki kemampuan bagus bisa langsung di ajak perusahaan untuk ikut bergabung, sedangkan yang tidak langsung di ajak perusahaan bisa melakukan usaha bagi dirinya itupun jika memiliki modal. Bagi mereka yang tidak diajak perusahaan dan tidak memiliki modal dan keinginan untuk berkembang pelatihan akan menjadi sia-sia karena tidak dipergunakan. Pelatihan berhenti di berikan, pekerjaan pemerintah pun berhenti.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Pelatihan Keterampilan 2019

No.	Jenis Penelitian	Kuota Peserta	Lama Pelaksanaan
1.	Membatik (MTU Kec. Danurejan)	20 orang	16 hari
2.	Pembuatan Kue Roti (MTU Kec, Tegalrejo)	20 orang	14 hari
3.	Stir Mobil dan SIM A	60 orang	4-5 kali
4.	Pembuatan Kue Roti	40 orang	14 hari
5.	Membatik Lanjutan Bagi Disabilitas	20 orang	7 hari
6.	Membatik Lanjutan (MTU Kec. Ngampilan)	20 orang	16 hari
7.	Stir Mobil dan SIM B	40 orang	4-5 kali
8.	Tata Boga	40 orang	20 hari
9.	Tata Rias Kecantikan	20 orang	22 hari
10.	Menjahit Dasar	40 orang	27 hari
11.	<i>Customer Service</i>	20 orang	30 hari
12.	<i>Airport Operation Service</i>	20 orang	30 hari
13.	Barista	20 orang	22 hari
14.	Tata Rias Pengantin	25 orang	25 hari
15.	Menjahit Kebaya dan Surjan (Mahir)	20 orang	22 hari
16.	Komputer Desain Grafis dan Website	20 orang	22 hari
17.	Perhotelan	20 orang	25 hari
18.	Tata Rias Karakter	20 orang	22 hari
19.	Tata Rias Pengantin Paes Ageng	25 orang	27 hari
20.	Menjahit Terampil	20 orang	30 hari
21.	SPA Terapis	20 orang	22 hari
22.	Satpam	20 orang	21 hari
23.	<i>Travel Agent</i>	20 orang	22 hari

(Sumber: Dinkop, UKM, dan Nakertrans, 2019)

Dinas-dinas lain juga memberikan pelatihan seperti DPMPPA yang memberikan pelatihan memasak kue, menjahit. Pelatihan yang diberikan oleh DPMPPA khusus untuk ibu-ibu di masyarakat, dengan tujuan ibu-ibu tersebut bisa memberdayakan diri mereka sendiri. Tidak hanya pemerintah tetapi organisasi non

pemerintah juga ada yang memberikan pelatihan khusus dengan biaya dari Yayasan maupun sumbangan.

Badan Sosial Mardi Wuto merupakan lembaga sosial yang melakukan pemberdayaan untuk disabilitas netra. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah memberi pelatihan dan pendampingan kursus komputer bicara, kursus pijat, kursus Bahasa Inggris, kursus kewirausahaan, kursus keterampilan (pelatihan pembuatan makanan), dan penengenalan lingkungan (oubond, arung jeram, dan jelajah alam). Melalui pelatihan yang diberikan oleh BS Mardi Wuto diharapkan bisa meningkatkan sumber daya para disabilitas netra menuju kemandirian.

Gerakan Gandeng Gendong adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya. Program Gandeng Gendong adalah upaya mengurangi kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pemerintah akan membeli produk makanan seperti *snack* dari kelompok usaha masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang ada di OPD di Yogyakarta. Setiap satu RW dianjurkan untuk memiliki satu kelompok usaha.

Gerakan gandeng gendong adalah program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Gerakan gandeng gendong program yang baik, karena mengajak masyarakat untuk saling bekerja sama untuk meningkatkan penghasilan dalam perekonomian. Gerakan gandeng gendong akan berjalan dengan baik kepada kelompok yang telah memiliki uang kas, tetapi tidak begitu kepada kelompok kecil



yang tidak memiliki uang kas. Program gandong gandong tidak langsung membayarkan uang pembayaran, tetapi dibayarkan tiga bulan sekali. Hal ini menjadi masalah untuk kelompok kecil karena jika pembayaran dilakukan tiga bulan sekali maka usaha kelompok kecil akan berakhir, tidak ada modal untuk memulai usaha kembali. Program ini akan berjalan jika pemerintah kota menunjuk pemerintah kelurahan untuk memegang modal, kemudian disaat ada pemesanan kelurahan memberikan modal sehingga kelompok kecil bisa ikut dalam program ini.

#### **1.1.5 *Stranger***

Berbicara mengenai Kota Inklusif adalah berbicara mengenai kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama atas pelayanan, kesempatan, dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Kesetaraan ada karena perbedaan yang menjadikannya berbeda, padahal semuanya adalah sama jika dilihat pada sisi yang sama. Perbedaan suku, agama, ras, antar golongan merupakan yang di maksud sebagai orang asing disini. Walaupun menjadi pembeda bukan berarti tidak mendapatkan pelayanan yang sama dengan kebanyakan orang. Pelayanan dan perlakuan di masyarakat tetap berlaku secara umum tanpa membeda-bedakan. Orang yang tinggal di kota dapat menjadi manusia yang lebih kompleks jika mereka belajar hidup bersama orang asing, menjumpai keanekaragaman, memasuki pengalaman dan minat hidup yang tidak dikenal (Bunyan, 2016).

Yogyakarta bisa dibilang Indonesia versi kecil. Banyak pendatang yang berkunjung untuk berlibur, datang untuk menempuh pendidikan, maupun pindah

domisili. Keberagaman budaya kemudian menjadi hal yang bisa dilihat di Yogya, walaupun demikian perbedaan budaya, suku, agama, ras tetap menjadikan masyarakat hidup berdampingan. Saling menghormati kebudayaan satu sama lain merupakan dasar untuk hidup rukun bersama, tetapi pendatang juga harus menempatkan diri bahwa mereka yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebiasaan lingkungan mereka tinggal.

“setiap penduduk yang berdomisili dan memiliki ktp Kota Yogyakarta dapat akses lebih seperti anggaran, sedangkan berbeda dengan pendatang. Kan tidak mungkin anggaran Kota Yogyakarta digunakan pendatang. Contohnya pelatihan. Tetapi semuanya yang berdomisili aupu pendatang mendapatkan pelayanan yang sama”

(Hasil wawancara dengan Ibu Ana Staf Dinas Sosial pada hari Selasa, 22 Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas Sosial).

Setiap penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta mendapatkan pelayanan yang sama. Pendatang dapat menikmati pelayanan dan fasilitas publik, yang membedakan adalah penggunaan anggaran. Anggaran dana hanya dapat diperoleh masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian kita perlu memikirkan tentang bagaimana melihat sebuah hubungan sebagai koneksi dengan orang lain dan membuat gagasan mengenai “orang asing” tidak menjadi permasalahan (Jackson et al, 2016).

## **2. *Smart City***

Kota Yogyakarta merupakan kota berbudaya dan kreatif. Kota Yogyakarta berusaha menjawab tantangan Kawasan perkotaan tanpa meninggalkan karakter

dan jati diri. Pembangunan di Kota Yogyakarta diarahkan untuk mengembangkan sektor unggulan daerah seperti:

- Kota nyaman huni
- Kota budaya
- Kota seni
- Kota pusat pendidikan
- Revitalisasi sungai
- Revitalisasi pasar tradisional
- Penambahan ruang terbuka hijau
- Penambahan pelayanan kesehatan
- Ruang kreativitas anak muda
- Kampung ekonomi kreatif
- Peningkatan industri jasa

Peningkatan pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mendukung terbangunnya *Smart City*. *Smart city* atau kota cerdas adalah kota yang mampu memanfaatkan berbagai data terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih efisien dan efektif.

*Smart city* di Kota Yogyakarta terdiri dari 6 elemen, yaitu:

1. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Membuat pemerintah dan masyarakat untuk bertanggungjawab kepada lingkungan, menjaga dan memberikan yang terbaik untuk tetap terlibat secara berkala.

## 2. *Smart Governance* (Pemerintahan Cerdas)

Pemerintah berusaha membuat kinerja birokrat mengalami peningkatan dan bisa mempergunakan teknologi agar pelayanan yang diberikan bisa efektif dan efisien dan dimengerti masyarakat sebagai yang dilayani oleh pemerintah.

## 3. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Meningkatkan perekonomian masyarakat karena itu pemerintah melakukan Gerakan gandeng gendong sebagai salah satu cara pemerintah membantu meningkatkan perekonomian dan membuat masyarakat kecil produktif.

## 4. *Smart Living* (Hidup Cerdas)

Kota Yogyakarta menjadi tempat berkumpul beragam latar belakang karena menjadi tujuan untuk berwisata, sehingga bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa menciptakan hidup yang saling berdampingan di masyarakat demi lingkungan tempat tinggal yang layak huni dan nyaman untuk dihuni tanpa ada permasalahan yang tercipta dari perbedaan.

## 5. *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)

Membuat masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana untuk terlibat dalam pemerintahan. Ikut berpartisipasi dan mengawal kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan kota inklusif pada akhirnya juga kebutuhan masyarakat.

## 6. *Smart Branding*

Kota Yogyakarta memiliki kelebihan karena merupakan kota budaya dan menjadi tujuan wisata. Pemanfaatan hal ini untuk lebih memperkenalkan Kota Yogyakarta kepada banyak pihak.

Indikator Kota Inklusif yang dilihat pada penelitian ini semua termasuk dalam rencana *smart city* Kota Yogyakarta, sehingga *smart city* dan Kota Inklusif saling terhubung satu dengan lainnya. Pemerintah memiliki peran yang besar untuk mewujudkan Kota Inklusif dan *Smart City*. Pemerintah mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses keperluan mereka. Untuk dianggap "pintar", kota harus memperkuat partisipasi semua orang yang mengakui keragaman warga negara, perjuangan menentang pemisahan kaum minoritas, dan berusaha, sebisa mungkin, untuk menghilangkan, bukan hanya hambatan fisik tetapi juga digital. Itulah yang kami sebut Kota Cerdas Inklusif (Neto and Kofuji, 2016).

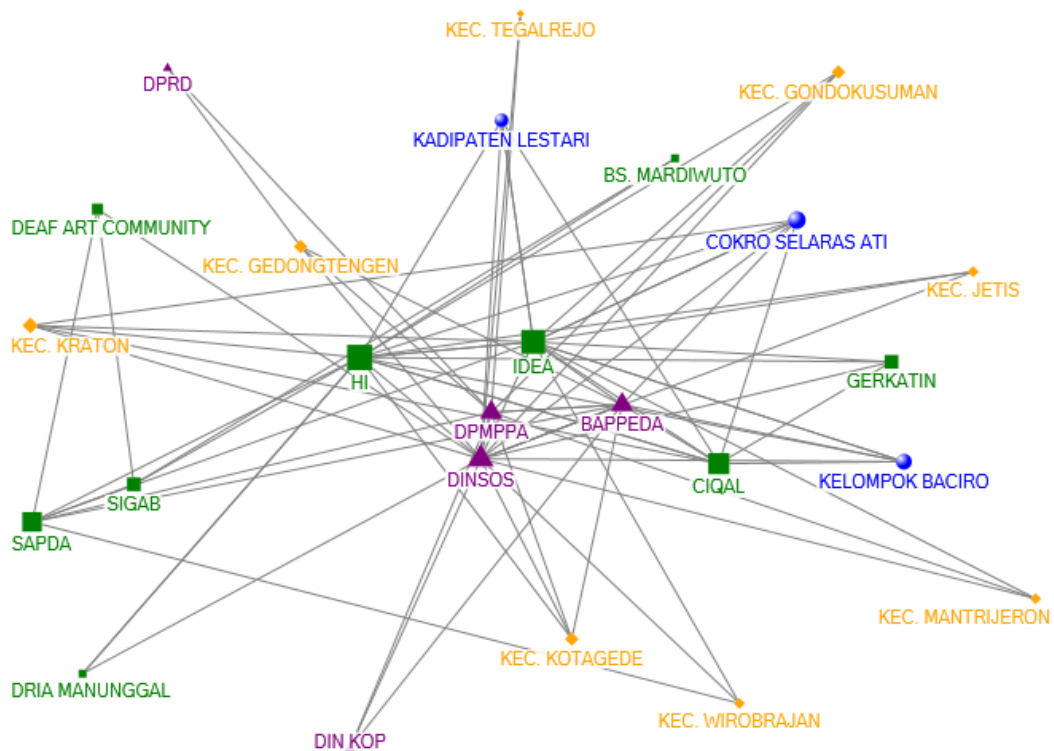
Berdasarkan *Smart City Masterplan* Kota Yogyakarta pada 6 elemen terbagi menjadi ada 18 poin, yaitu Pelayanan publik, birokrasi, kebijakan publik, pariwisata, bisnis, penataan kota, industry, kesejahteraan, transaksi, harmoni, kesehatan, mobilitas, komunitas, edukasi, keamanan, perlindungan, daur ulang, dan energi. *Smart city* tidak selalu mengenai teknologi tetapi juga bisa dengan sasaran mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien serta tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Sasaran dari pemerintah adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan

peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Dinas-dinas mencoba memberikan kemudahan mendapatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan website. Membuat surat izin masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Perizinan, masyarakat bisa mengurus surat izin bisa langsung mengurusnya melalui website Dinas Perizinan. Lama proses perizinan tergantung dari izin apa yang dibuat dan semua orang bisa mengaksesnya.

## **1.2 Aktor/*Stakeholder* yang ikut berperan untuk mewujudkan Kota Inklusif**





Mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta bukan hanya tugas dari Pemerintah Daerah tetapi tugas semua pihak, baik *stakeholder* hingga masyarakat juga harus ikut serta untuk mewujudkannya. Pada poin kedua ini akan melihat siapa saja *stakeholder* yang ikut berperan dan siapa saja *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam Kota Inklusif. Melihat keterkaitan *stakeholder* satu dengan yang lainnya didapat melalui *Social Network Analisis (SNA)* dengan menggunakan *software* NodeXL. Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data diberikan kepada *stakeholder* kemudian terkumpul 50 responden dari 25 *stakeholder*. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut didapatkan bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 5.1  
 Jejaring *stakeholders* Kota Inklusif di Kota Yogyakarta  
 (Sumber: Hasil Analisa menggunakan *software* NodeXL)

Berdasarkan grafik di atas terlihat ada dua puluh lima *stakeholder* yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membentuk jejaring. Melalui jejaring di atas juga bisa terlihat siapa saja yang saling berkaitan dan siapa saja yang tidak terkait satu sama lain. Bentuk dan warna dari *vertices* berfungsi untuk membedakan *stakeholder* yang ikut serta untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta. Keterangan bentuk dan warna dari *vertices* akan terlihat lebih jelas pada tabel di bawah.

Tabel 5.3  
Keterangan Bentuk dan Warna *Vertices*

Visualisasi <i>Vertices</i>	Keterangan
	Organisasi Perangkat Daerah
	Kecamatan percontohan di Kota Inklusif
	Organisasi Non-pemerintah
	Kelompok Masyarakat

Melalui tabel di atas bisa terlihat bahwa stakeholder di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Inklusif di bedakan menjadi 4 bagian. *Stakeholder* yang ada terdiri dari organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah terdiri dari Lembaga maupun kelompok di masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah atau dinas-dinas yang di koordinir oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan-Kecamatan di Kota Yogyakarta yang menjadi Kecamatan Percontohan Kota Inklusif. Organisasi non-pemerintah yaitu Lembaga memiliki bentuk *vertice solid square* dengan warna hijau, sedangkan kelompok masyarakat bentuk *vertice sphere* berwarna biru. Organisasi Perangkat Daerah memiliki bentuk *vertice solid triangle* dengan warna ungu, sedangkan kecamatan percontohan Kota Inklusif memiliki bentuk *vertice solid diamond* berwarna jingga.

Grafik 5.1 menggambarkan jaringan antar *stakeholder* yang terjadi pada Kota Inklusif. Berdasarkan grafik 5.1 yang diolah menggunakan NodeXL, dapat dilihat metrik hasil dari *Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, *Betweenness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality*. Keempat metrik tersebut merupakan metrik penting yang ada pada *Social Network Analysis*. Berikut *stakeholder-stakeholder* yang memenuhi keempat metrik pada SNA.



Tabel 5.4

Analisis *stakeholders* berdasarkan visualisasi NodeXL

No.	Metrik	<i>Stakeholder</i>	Keterangan
1.	<i>Degree Centrality</i>	Dinas Sosial	<i>Single-actor</i>
2.	<i>Closeness Centrality</i>	Dinas Sosial	<i>Single-actor</i>
3.	<i>Betweenness Centrality</i>	Dinas Sosial	<i>Single-actor</i>
4.	<i>Eigenvector Centrality</i>	Dinas Sosial	<i>Single-actor</i>

(Sumber: Hasil Perhitungan SNA)

Pada SNA dan menggunakan NodeXL untuk mengukur hubungan antar aktor didapati hasil seperti tabel 5.3. Keempat metrik pada SNA *Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, *Betweenness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality* menjadikan Dinas Sosial menjadi aktor tunggal. Dinas Sosial merupakan aktor pada *Degree Centrality*. Dinas Sosial menjadi aktor kunci pada Kota Inklusif. Begitu juga untuk *Closeness Centrality*, Dinas Sosial merupakan aktor yang memiliki kedekatan dengan *stakeholder* lain. Dinas Sosial adalah salah satu OPD pelaksana Kota Inklusif di Kota Yogyakarta.

Dinas Sosial tetap menjadi aktor pada metrik *Betweenness Centrality*. Dinas Sosial menghubungkan *stakeholder-stakeholder* yang saling terkait pada Kota Inklusif, sedangkan untuk *Eigenvector Centrality*, aktor yang paling terhubung pada pelaksanaan Kota Inklusif Kota Yogyakarta masih tetap Dinas Sosial yang menjadi aktor. Berdasarkan perhitungan metrik Dinas Sosial adalah aktor pada setiap metrik pada SNA.

Perhitungan metrik pada NodeXL akan menyajikan data-data perhitungan untuk keempat metrik di SNA. Data *stakeholder* yang saling berhubungan di susun pada kolom *vertex 1* dan *vertex 2* di *edges*, kemudian masukan data ke dalam kolom *opacity* di *vertices*. Saat semua data telah sesuai barulah bisa dilakukan analisis

penghitungan metrik atau *graph metrics*. Pada *graph metrics*, keempat metrik yang datanya ingin di munculkan akan dihitung. Hasil perhitungan *graph metrics* akan terlihat di *overall metrics* dan *vertices*. Data yang muncul pada *overall metrics* adalah grafik dan angka *minimum*, *maximum*, *average*, dan *median* pada masing-masing metrik, sedangkan data di *vertices* adalah data perhitungan keseluruhan dari masing-masing *stakeholder* pada masing-masing metrik. Melihat jaringan-jarinnan yang terbentuk pada NodeXL bisa dari *show graph*, berdasarkan grafik tersebut bisa terlihat lebih jelas siapa saja yang saling terhubung dan siapa saja *stakeholder* yang tidak saling terhubung.

Hasil perhitungan metrik menunjukkan angka untuk masing-masing *stakeholder* pada *Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, *Betweenness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality* di tampilkan pada analisis berikut:

#### 1) *Degree Centrality*

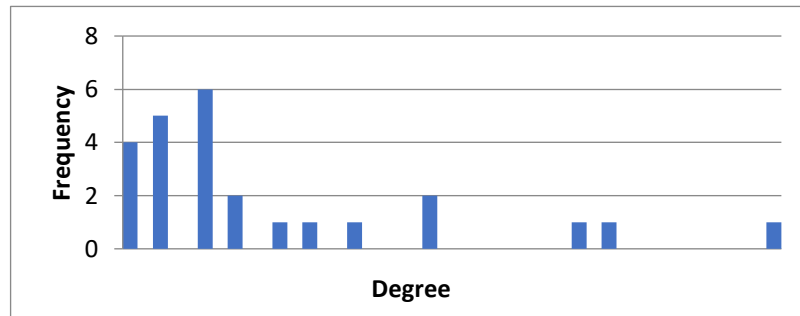
*Degree Centrality* digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan dan juga mempengaruhi popularitas. *Degree Centrality* berguna dalam melihat penyebaran informasi, mempengaruhi orang lain di daerah lingkungannya secara langsung dan mengetahui jumlah orang yang dapat dijangkau (Cheliotis, 2010). Melalui *Degree Centrality* bisa terlihat siapa *stakeholder* yang paling banyak terhubung dengan *stakeholder* lainnya. Informasi yang didapatkan bisa berupa memberikan informasi pada pihak lain atau menerima informasi dari pihak lain. Stakeholder saling terhubung dalam informasi yang berhubungan dengan lingkungannya. Hubungannya jejaring berjalan dengan baik jika berjalan dua arah

antar *stakeholder*. Penjelasan mengenai hasil pengukuran metrik *Degree Centrality* akan dijabarkan dalam bentuk tabel dan grafik berikut.

Tabel 5.5  
Data Perhitungan *Degree Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor
1	Dinas Sosial	19
2	<i>Humanity &amp; Inclusion</i>	15
3	Perkumpulan Idea	14
4	DPMPPA	10
5	BAPPEDA	10
6	CIQAL	8
7	SAPDA	7
8	Cokro Selaras Ati	6
9	Kelompok Baciro	5
10	Kec. Kraton	5
11	Kadipaten Lestari	4
12	Kec. Kotagede	4
13	Kec. Gondokusuman	4
14	Kec. Gedongtengen	4
15	SIGAB	4
16	Gerkatin	4
17	Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans KY	3
18	Kec. Jetis	3
19	Kec. Wirobrajan	3
20	Kec. Mantriheron	3
21	<i>Deaf Art Community</i>	3
22	Kec. Tegalrejo	2
23	Dria Manunggal	2
24	BS. Mardi Wuto	2
25	DPRD Kota Yogyakarta	2

(Sumber : Hasil Perhitungan SNA)



Minimum Degree	2
Maximum Degree	19
Average Degree	5.840
Median Degree	4.000

Sumber : Hasil Perhitungan SNA

Pada hasil perhitungan *Degree Centrality* dengan menggunakan NodeXL di atas, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi diperoleh Dinas Sosial dengan 19 dan nilai terendah diperoleh beberapa stakeholder dengan skor 2. *Stakeholder* yang mendapatkan skor dua adalah Kecamatan Tegalgrejo, Dria Manunggal, Badan Sosial Mardi Wuto dan DPRD Kota Yogyakarta. Keempat aktor tersebut tidak banyak memiliki hubungan dengan aktor lain yang sama-sama ikut serta dalam upaya mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta. Informasi yang mereka terima dari pihak lain tidak banyak. Hal ini bisa jadi karena aktor-aktor tersebut mengutamakan satu prioritas saja. Bukan menutup informasi dari berbagai tema dalam Kota Inlusif tetapi hanya memfokuskan pada visi misi yang mereka miliki.

“Badan Sosial Mardi Wuto khusus untuk disabilitas tunanetra. Badan Sosial Mardi Wuto ada di bawah Dinas Sosial, kalo ada kegiatan kita diikuti”

(Hasil wawancara dengan Sri Budiastuti (Ketua Badan Sosial Mardi Wuto) pada hari Senin, 28 Januari 2019 di Kantor Badan Sosial Mardi Wuto).

Badan Sosial Mardi Wuto merupakan badan usaha di bidang sosial yang mengutamakan layanan kepada masyarakat disabilitas netra. Kegiatan yang

dilakukan seperti pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya disabilitas netra menuju kemandirian. Kerjasama yang dilakukan juga dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki kesamaan.

“Kota Inklusif menjadi pintu masuk bagi kelompok yang mulai dulu sudah memperjuangkan disabilitas ikut dalam perencanaan memberikan masukan”

(Hasil Wawancara dengan Pak Setia (Direktur Eksekutif Dria Manunggal) pada hari Kamis, 17 Januari 2019 di Sekertariat Dria Manunggal.

Dria manunggal merupakan Kesekretariatan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta tetapi pada akhir tahun 2018 sudah berakhir dan belum di bentuk kembali kesekretariatan yang baru walaupun Bidang Lanjut Usia tetap masih ada di Dinas Sosial dan tetap melanjutkan apa yang menjadi tugasnya. Kerjasama antar *stakeholder* seperti kegiatan dan pertukaran informasi terus dilakukan. Informasi yang di berikan tidak hanya dari *stakeholder* yang memiliki peran besar tetapi juga sebaliknya. *stakeholder* besar mensosialisasikan mengenai kebijakan dan kegiatan yang ingin dilakukan kepada *stakeholders* lain kemudian *stakeholder* ini juga menyampaikan keinginannya kepada *stakeholder* yang memiliki peran yang lebih besar.

“setiap bulan ada pertemuan rutin yang dilakuakan. Permasalahan yang disampaikan akan diselesaikan jika kami bisa jika tidak bisa diselesaikan disini akan dibawa ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi”

(Hasil wawancara dengan Pak Andit, Staf di Kecamatan Kotagede pada hari Jum'at 18 Januari 2018 bertempat di Kantor Kecamatan Kotagede)

Saran dan masukan dari masyarakat selalu ada pada rapat bulanan FKI. Masukan yang disampaikan pada saat rapat jika bisa diselesaikan oleh pihak kecamatan akan diselesaikan, tetapi apabila pihak kecamatan tidak bisa maka

kecamatan akan menyampaikannya kepada Dinas Sosial dan OPD terkait untuk mencari jalan keluar. Keinginan masyarakat ada yang tidak bisa langsung terpenuhi karena keterbatasan anggaran contohnya rumah untuk disabilitas. Rumah disabilitas tidak bisa langsung terpenuhi butuh waktu 2 tahun untuk pemerintah bisa mewujudkannya dan akan mulai beroperasi 2020.

## 2) *Closeness Centrality*

Metrik *Closeness Centrality* mengukur berapa banyak langkah yang diperlukan untuk diakses oleh aktor tertentu ke aktor lain dalam jaringan. Ukuran akan mencapai maksimum untuk jaringan yang diberikan ukuran ketika aktor terhubung langsung ke semua orang lain dalam jaringan dan minimumnya ketika seorang aktor tidak terhubung ke aktor yang lain. Menangkap intuisi yang panjang jalur pendek antar aktor menandakan bahwa mereka lebih dekat satu sama lain (Denny, 2014).

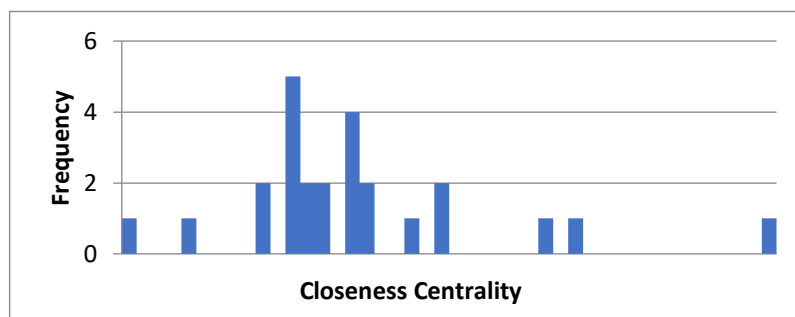
*Closeness Centrality* berhubungan dengan seberapa cepat penyebaran informasi kepada *stakeholder* lain. Jarak yang pendek membuat informasi yang diberikan akan lebih cepat tersampaikan sedangkan jarak yang relative jauh membuat informasi tidak cukup cepat untuk diperoleh. *Closeness Centrality* pada Kota Inklusif di Kota Yogyakarta bisa dilihat pada hasil perhitungan berikut:

Tabel 5.6  
Data Perhitungan *Closeness Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor
1	Dinas Sosial	0.034
2	<i>Humanity &amp; Inclusion</i>	0.029
3	Perkumpulan Idea	0.029

4	DPMPPA	0.026
5	BAPPEDA	0.026
6	SAPDA	0.024
7	Kelompok Baciro	0.023
8	CIQAL	0.023
9	Cokro Selaras Ati	0.023
10	Kec. Kraton	0.023
11	Kec. Kotagede	0.023
12	Kec. Gondokusuman	0.023
13	Kadipaten Lestari	0.022
14	Kec. Jetis	0.022
15	Kec. Gedongtengen	0.022
16	Gerkatin	0.022
17	Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans KY	0.021
18	Kec. Wirobrajan	0.021
19	Kec. Matrijeron	0.021
20	Dria Manunggal	0.021
21	Deaf Art Community	0.021
22	Kec. Tegalrejo	0.020
23	SIGAB	0.020
24	BS. Mardi Wuto	0.018
25	DPRD Kota Yogyakarta	0.016

(Sumber : Hasil Perhitungan SNA)



Minimum Closeness Centrality	0.016
Maximum Closeness Centrality	0.034
Average Closeness Centrality	0.023
Median Closeness Centrality	0.022

Nilai tertinggi pada perhitungan metrik ini adalah 0,034 dan dimiliki oleh Dinas Sosial. Nilai terendah 0,016 dimiliki DPRD Kota Yogyakarta. Nilai tertinggi yang dimiliki Dinas Sosial membuatnya lebih cepat melakukan interaksi dengan *stakeholder* lain. Perhitungan tertinggi pada *Closness Centrality* adalah 1. Nilai yang dimiliki oleh Dinas Sosial masih jauh dari angka 1, tetapi dengan nilai 0,034 membuatnya menjadi aktor yang paling mudah dan cepat untuk berinteraksi. Mendekati nilai 1 membuat aktor lebih cepat dan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan aktor lain di dalam jejaring (Oktora dan Alamsyah, 2014).

Dinas Sosial tidak banyak membutuhkan aktor lain jika ingin berhubungan. Dinas Sosial banyak terhubung dengan aktor yang populer dan tidak populer. Berbeda jika DPRD Kota Yogyakarta yang memiliki skor terendah dalam perhitungan SNA yang jika ingin berhubungan dengan aktor lain membutuhkan perantara untuk membuat sebuah hubungan. Jejaring pada Kota Inklusif belum begitu banyak karena program kerja yang masih baru dan belum mencakup keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta.

Jejaring yang terbentuk pada Kota Inklusif membuat *Maximum Geodesic Distance* atau diameter pada jejaring memiliki nilai 4. Diameter menunjukkan seberapa jauh untuk mencapai aktor yang dituju dalam jaringan. Semakin jarak yang dilalui pendek antara dua aktor dalam jaringan semakin cepat informasi tersampaikan (Cheliotis, 2010). Berdasarkan diameter maka hubungan yang terjalin pada jejaring Kota Inklusif ini cukup baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama jika ingin menyebarkan informasi.



*Average Geodesic Distance* atau rata-rata jalur pada antar aktor menunjukkan seberapa jauh jarak antara aktor untuk menyebarkan informasi (Cheliotis, 2010). Jarak rata-rata pada jejaring Kota Inklusif adalah 1,776 menunjukkan tidak semua aktor berada pada jarak yang berdekatan. Ada aktor yang berdekatan dan dengan cepat memperoleh informasi dan ada aktor yang berada jauh sehingga membutuhkan waktu untuk menerima informasi. Setiap bulan dilakukan pertemuan rutin yang membahas Kota Inklusif membuat informasi cepat tersampaikan. Kegiatan seperti inilah yang membuat informasi cepat untuk disebarkan dan di terima oleh *stakeholder* lain.

### 3) *Betweenness Centrality*

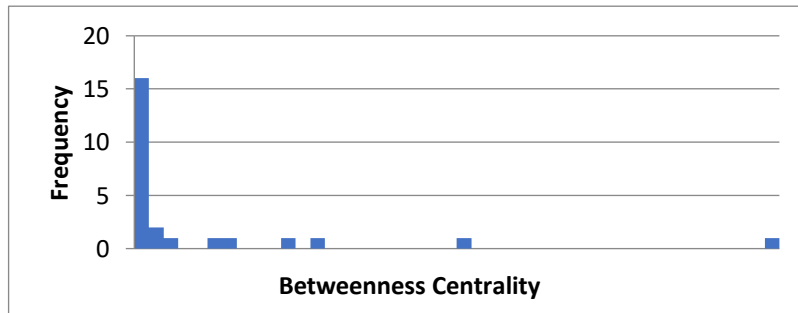
Menghubungkan *stakeholders* yang berada pada jalur hubungan yang melewati aktor tertentu merupakan tugas dari *Betweenness Centrality*. *Betweenness Centrality* menjadi penting karena menghubungkan aktor yang ingin berinteraksi tetapi tidak memiliki jalur secara langsung, karena itu membutuhkan aktor lain untuk menghubungkan kedua aktor yang saling berjauhan.

Tabel 5.7  
Data Perhitungan *Betweenness Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor
1	Dinas Sosial	100,259
2	<i>Humanity &amp; Inclusion</i>	53,511
3	DPMPPA	27,992
4	Perkumpulan Idea	25,271
5	BAPPEDA	15,700
6	SAPDA	13,069
7	Kec. Gedontengen	6,319
8	CIQAL	3,385

9	SIGAB	2,658
10	Deaf Art Community	1,700
11	Kec. Gondokusuman	1,160
12	Kec. Kotagede	1,085
13	Cokro Selaras Ati	0,837
14	Kelompok Baciro	0,587
15	Kec. Mantrijeron	0,343
16	Kec. Kraton	0,319
17	Kadipaten Lestari	0,319
18	GerkatIn	0,319
19	Kec. Wirobrajan	0,167
20	Dria Manunggal	0.000
21	Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans KY	0.000
22	Kec. Jetis	0.000
23	Kec. Tegalrejo	0.000
24	BS. Mardi Wuto	0.000
25	DPRD Kota Yogyakarta	0.000

(Sumber : Hasil Perhitungan SNA)



Minimum Betweenness Centrality	0.000
Maximum Betweenness Centrality	100.259
Average Betweenness Centrality	10.200
Median Betweenness Centrality	0.837

Dua aktor yang saling berjauhan ingin berinteraksi dan ada aktor lain berada di antara kedua aktor tersebut, maka aktor inilah yang menjadi penghubung antar dua aktor yang ingin berinteraksi. Aktor penghubung memiliki kontrol terhadap interaksi kedua aktor (Susanto, 2013). *Betweenness Centrality* ini secara intuitif

mengukur sejauh mana informasi atau hubungan harus mengalir melalui aktor tertentu dan kepentingan relatif mereka sebagai perantara dalam jaringan (Denny, 2014).

Ada beberapa kecamatan percontohan yang baru terbentuk sehingga mereka belum membentuk keanggotaan untuk Kecamatan Percotohan Kota Inklusif dan belum ada kegiatan yang mendukung kegiatan Kota Inklusif, sehingga kebijakan yang diberlakukan belum menyentuh beberapa wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. *Betweenness Centrality* memiliki posisi sebagai “jembatan” antara dua aktor yang berjauhan ingin terhubung untuk berbagi informasi, jika jembatan yang menghubungkan antar kedua aktor tersebut terputus maka informasi tidak akan tersampaikan. Hubungan yang terbentuk jika “jembatan” tidak ada hanya akan terjadi pada aktor yang berdekatan sehingga aktor yang jauh tidak akan termasuk dalam hubungan karena tidak terjangkau (Hansen et al, 2009).

Keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota inklusif di seluruh kota Yogyakarta begitu besar tetapi pada kenyataannya pemerintah belum bisa menyentuh semua wilayah di Kota Yogyakarta karena jaringann yang terbentuk belum begitu besar untuk menjangkau semua wilayah di Kota Yogyakarta. Dinas Sosial menjadi “jembatan” atau *Betweenness Centrality* pada Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dengan nilai tertinggi yaitu 100,259. Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam pelaksanaan setelah Bappeda menyusun perencanaan.

“Bappeda menyusun perencanaan pembangunan, lembaga atau organisasi yang bersangkutan di undang untuk memberikan masukan. OPD yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, monitoring, penanganan.”

(Hasil wawancara dengan Sulistiyo (Staf Bidang Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta) pada hari Jum'at, 11 Januari 2019 di Kantor Bappeda)

Dinas sosial memiliki nilai tertinggi karena menjadi penghubung antar aktor. Pertemuan rutin yang dilakukan mengumpulkan FKI, TKSK dan perwakilan-perwakilan dari kelompok lain untuk membahas kegiatan Kota Inklusif. Organisasi yang berada di wilayah menyampaikan kepada masyarakat tentang Kota Inklusif begitu pula sebaliknya, masukan dari masyarakat akan ditampung dan didiskusikan pada saat pertemuan yang dilaksanakan.

Hasil perhitungan SNA mengenai *Betweenness Centrality* ada 6 aktor yang memiliki hasil perhitungan terendah yaitu 0,000 yang berarti mereka tidak menjadi penghubung yang dominan antar aktor lain. Keenam aktor tersebut adalah Dria Manunggal, Dinas Koperasi, UKM, Narkertrans Kota Yogyakarta, Kec. Jetis, Kec. Tegalorejo, Badan Sosial Mardi Wuto, dan DPRD Kota Yogyakarta. Aktor-aktor tersebut tidak memiliki peran yang cukup besar dalam mewujudkan Kota Inklusif jika dilihat pada hasil perhitungan SNA. Setiap aktor memiliki perannya tersendiri dan bidangnya sendiri. Aktor yang memiliki peran besar mencakup semua bidang dalam Kota Inklusif, sedangkan aktor yang tidak memiliki jaringan luas fokus hanya pada bidang tertentu. Pembahasan Kota Inklusif sangat luas, Badan Sosial Mardi Wuto mengutamakan layanan kepada masyarakat disabilitas netra.

#### 4) *Eigenvector Centrality*

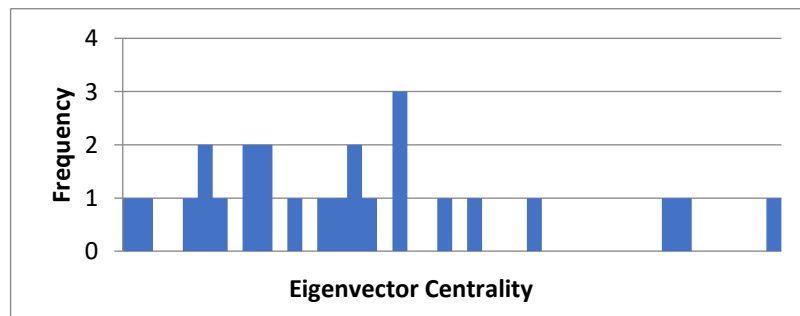
Aktor *Eigenvector Centrality* adalah Dinas Sosial. *Eigenvector Centrality* mengukur sejauh mana seorang aktor terhubung dengan aktor-aktor lain dan

memiliki keterkaitan dalam jaringan (Denny, 2014). Hasil perhitungan dari NodeXL sebagai berikut:

Tabel 5.8  
Data Perhitungan *Eigenvector Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor
1	Dinas Sosial	0.095
2	Perkumpulan Idea	0.084
3	<i>Humanity &amp; Inclusion</i>	0.081
4	BAPPEDA	0.063
5	CIQAL	0.056
6	Cokro Selaras Ati	0.052
7	DPMPPA	0.047
8	Kelompok Baciro	0.047
9	Kec. Kraton	0.045
10	SAPDA	0.042
11	Kadipaten Lestari	0.039
12	Gerkatin	0.039
13	Kec. Gondokusuman	0.038
14	Kec. Kotagede	0.035
15	Kec. Jetis	0.032
16	Kec. Mantrijeron	0.028
17	Kec. Wirobrajan	0.027
18	Kec. Gedongtengen	0.026
19	Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans KY	0.025
20	Dria Manunggal	0.022
21	SIGAB	0.019
22	Deaf Art Community	0.019
23	Kec. Tegalrejo	0.017
24	BS. Mardi Wuto	0.012
25	DPRD Kota Yogyakarta	0.009

(Sumber : Hasil Perhitungan SNA)



Minimum Eigenvector Centrality	0.009
Maximum Eigenvector Centrality	0.095
Average Eigenvector Centrality	0.040
Median Eigenvector Centrality	0.038

*Maximum Eigenvector Centrality* dengan skor 0,095 dimiliki oleh Dinas Sosial, hal tersebut yang menjadikan Dinas Sosial menjadi *stakeholder* yang banyak terhubung dengan *stakeholders* penting lainnya. Terhubung dengan *stakeholder* yang memiliki peran penting membuat nilai metrik lebih tinggi daripada terhubung dengan *stakeholder* yang kurang populer (Hansen, et al, 2011). Dinas Sosial merupakan Organisasi Perangkat Daerah karena itulah memiliki hubungan sangat baik dengan *stakeholder* lain didukung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Sosial.

Dinas Sosial terhubung dengan *stakeholder* lain untuk memberikan arahan, masukan, dukungan, mensosialisasikan kegiatan dan menerima masukan dari *stakeholder* yang usulanya jarang didengar. Sesuai dengan peran pemerintah yang melakukan pemberdayaan dan melakukan pelayanan karena setiap masyarakat memiliki hak untuk didengar. Setiap kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Kota Inklusif pasti diketahui oleh Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial menjadi

*stakeholder* yang memiliki interaksi baik antar *stakeholder*. Sesuai dengan analisa *Eigenvector Centrality* yang bertujuan menemukan *stakeholder* dengan performa terbaik (Oktora dan Alamsyah, 2014).

Berbicara mengenai Kota Inklusif, banyak *stakeholder* menyebutkan Dinas Sosial sebagai *stakeholder* yang berperan dalam mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta. *Stakeholder* yang banyak menerima tautan atau *stakeholder* lain mengarahkan pada *stakeholder* tertentu membuatnya menjadi *Eigenvector Centrality* dalam jejaring (Cheliotis, 2010). Melihat kerjasama antar *stakeholder* bisa dilihat dari nilai *density* pada perhitungan SNA. Jaringan terhubung dengan sempurna memiliki nilai 1. Jika nilai perhitungan mendekati 1 menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang tinggi antar *stakeholder* (Purnomo, et al, 2018).

Nilai *density* pada perhitungan ini adalah 0,243. Nilai tersebut menunjukkan kerjasama yang terjalin antar *stakeholder* rendah. Penyebabnya bisa saja karena program yang baru berjalan beberapa tahun sehingga kerjasama yang terjalin belum begitu banyak. Kerjasama yang terjalin hanya pada *stakeholder* yang memiliki peran cukup besar dan belum begitu banyak kerjasama yang terjalin pada *stakeholder* yang ada di wilayah.